

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA DAERAH FUNGSI
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN BELANJA MODAL SEBAGAI
VARIABEL PEMEDIASI**

(Studi pada provinsi dengan IPM sedang di Indonesia)

Tesis

**OLEH
ZAYENDRA**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA DAERAH FUNGSI
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN BELANJA MODAL SEBAGAI
VARIABEL PEMEDIASI**

(Studi pada provinsi dengan IPM sedang di Indonesia)

**OLEH
ZAYENDRA**

Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

**Pada
Program Magister ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**LOCAL INCOME EFFECT ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX WITH
EDUCATION EXPENDITURES, HEALTH EXPENDITURES AND
CAPITAL EXPENDITURES AS INTERVENING VARIABLE
(Studies in provinces with medium HDI in Indonesia)**

By:

ZAYENDRA

ABSTRACT

The purpose of national development is to realize a prosperous life of Indonesian society. In fact a form of improving the quality of human and people of Indonesia that is reflected in the magnitude of Human Development Index (HDI). Although the construction has touched all Indonesian people, but has not been able to reach even distribution of life of the whole community. The impact of it all held regional autonomy with the goal of achieving prosperity through the provision of public services more equitable and shorten the distance between public service providers and local communities. Decentralization principle, has the objective to realize the independence of the region in improving the service and welfare of the community. Several previous studies mentioned several factors associated with an increase in the Human Development Index include the locally-generated revenue, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund. All three of these resources will be effective if distributed through the Capital Expenditure. This study aims to prove empirically the influence of the local revenue of the Human Development Index if distributed through education expenditures, health expenditures and capital expenditures. This study takes the study population across the province throughout Indonesia. And of purposive sampling method obtained 23 provinces in Indonesia serve as sample that is the province with its medium HDI category during the period 2010-2014. The analysis used the analysis of SEM (Structural Equation Model) using path analysis, the equation model that measures the direct and indirect influence. The first model to measure the direct effect of local income against education expenditure, health expenditure, and capital expenditures. The second model to measure the effect of local income, education expenditure, health expenditure, capital expenditure to the Human Development Index. The results of statistical tests on the first model shows that the positive effect on local revenue to education expenditure, health expenditure and capital expenditures. The second model shows that the educational expenditure, health expenditure was not a positive influence on Human Development Index, while local revenue and expenditure in the form of capital expenditure has positive influence on the Human Development Index. With path analysis found that capital expenditure mediates the influence of the local revenue of the Human Development Index.

Keywords: Local Income, Education expenditure, Health Expenditure, Capital Expenditure and Human Development Index

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DENGAN BELANJA DAERAH FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN
DAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI**

(Studi pada provinsi dengan IPM sedang di Indonesia)

Disusun Oleh:

ZAYENDRA

ABSTRAK

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Wujud nyatanya adalah peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang tercermin pada besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun pembangunan telah menyentuh seluruh masyarakat Indonesia namun belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Dampak dari itu semua dilaksanakanlah otonomi daerah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan layanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal. Desentralisasi prinsipnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan beberapa faktor yang berhubungan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Ketiga sumberdaya tersebut akan efektif jika disalurkan melalui Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari pendapatan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia jika disalurkan melalui belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan, belanja daerah berupa belanja modal. Penelitian ini mengambil populasi penelitian seluruh Provinsi se Indonesia. Dan dari metode purposive sampling diperoleh 23 Provinsi di Indonesia dijadikan sebagai sample yaitu provinsi dengan kategori angka IPM nya sedang selama periode 2010-2014. Analisis menggunakan analisa SEM (*Structural Equation Model*) menggunakan analisa jalur, dengan model persamaan yang mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung. Model pertama mengukur pengaruh langsung pendapatan daerah terhadap belanja fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan, serta belanja daerah berupa belanja modal. Model kedua mengukur pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan, belanja daerah berupa belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil test statistik pada model pertama menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan dan belanja daerah berupa belanja modal. Model kedua menunjukkan bahwa belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pendapatan daerah dan belanja daerah berupa belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan analisa jalur ditemukan bahwa belanja modal memediasi pengaruh pendapatan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Fungsi Pendidikan, Belanja Daerah Fungsi Kesehatan, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia

Judul Tesis : **PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA DAERAH FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI**
(Studi pada Provinsi dengan IPM Sedang di Indonesia)

Nama Mahasiswa : **Zayendra**

No. Pokok Mahasiswa : 1421031041

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.
NIP 19801017 200512 2 002

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.

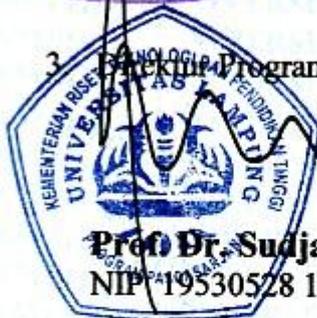
Penguji Utama : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

3. ~~Dekan~~ Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 30 Juli 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Tesis dengan judul: "Pengaruh pendapatan daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan belanja modal sebagai variabel pemediasi" adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis orang lain dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia serta sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2016

buat Pernyataan,



Zayendra

NPM. 1421031041

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang, tanggal 02 Januari 1976, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Bapak H. Zakaria Yacub dan Ibu Hj. Misrida.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 1988. Tahun 1991 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Krui Kabupaten Pesisir Barat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan pada tahun 1994 di SMAN 2 Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Perbanas Jakarta diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis memulai karir sebagai pegawai pada Bank Artha Graha sebagai staf di Divisi Satuan Kerja Audit Internal dan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006, dan ditempatkan di Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

MOTO HIDUP

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada Dia-lah tempat meminta dan memohon

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesainya studiku dan

Kupersembahkan karyaku ini untuk

Papa, Mama, Isteri, kedua anakku tercinta atas segala pengorbanan, doa, kesabaran dan kasih sayang yang tak ternilai yang telah diberikan selama ini.

Orang-orang tercinta yang selalu mendukung dan memberikan doa atas semua yang telah kucapai selama ini.

Semua orang yang terlibat dalam penyelesaian studiku.

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Tesis yang berjudul “Pengaruh pendapatan daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan belanja modal sebagai variabel pemediasi”, disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Jurusan Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Susi Sarumpaet, Ph.D.,Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan saran, masukan dan nasihatnya dalam penyelesaian tesis ini.

4. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan ilmunya, tenaga, dan pikirannya dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si., selaku Penguji Kedua yang telah berusaha semaksimal mungkin memberikan saran dan nasihatnya menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tuaku, Bapak H. Zakaria Yacub dan Ibu Hj. Misrida yang telah memberikan dukungan serta doa serta senantiasa berkorban dan mengusahakan yang terbaik bagi penulis tanpa mengenal lelah.
8. Isteriku tercinta, Windria Dharma, terimakasih atas perhatian, dukungan, doa dan nasihatnya bagi penulis, untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Anak-anakku tersayang: Zianka Benzema dan Kayyisa Athaya Khansa terimakasih atas pengertiannya.
10. Kakakku Yefmuheri beserta keluarga serta adikku Wenti Oktarika beserta keluarga, terimakasih atas perhatian dan doanya.
11. Bapak Kepala BPKP Pusat dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi serta dukungan baik moril maupun materil.
12. Bapak Drs. Benkeda, Kadis Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, atas dukungan dan izin yang telah diberikan untuk penulis dalam melaksanakan studi ini.

13. Seluruh staf dan karyawan program studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
14. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi Star BPKP Batch I , Acep, Sukani, Lilis Suryani, Reny Astuti, Mega, Sadu Fitriani, Siti Juweni, Firda, Anifa, Ovi, Wahdani, Sidiq, Fadriansyah, Windy, FERIA, Nani, Endang, Dwi Laila, Nurul, Desi, Dewi, Henny, Maisaroh, Bernadeta, Syamsidah. Terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
15. Teman-teman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pesisir Barat terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan.

Terima kasih.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis

Zayendra

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Perumusan Masalah	16
1.3	Tujuan Penelitian	17
1.4	Manfaat Penelitian	17
	1.4.1 Manfaat Teoritis/Keilmuan	17
	1.4.2 Manfaat Praktis	18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1	Penganggaran di Pemerintahan Daerah	19
2.2	Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia	20
2.3	Teori keagenan (<i>Agency Theory</i>)	24
2.4	Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia	25
2.5	Pendapatan Daerah	27
2.6	Belanja Daerah	30
2.7	Belanja Daerah Fungsi Pendidikan.....	33
2.8	Belanja Daerah Fungsi Kesehatan	34
2.9	Belanja Modal	34
2.10	Indeks Pembangunan Manusia.....	35
2.11	Penelitian Terdahulu.....	39

2.12	Kerangka Pemikiran	44
2.13	Hipotesis	44
2.13.1	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Daerah Fungsi Pendidikan.....	44
2.13.2	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Daerah Fungsi Kesehatan.....	45
2.13.3	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Modal.....	46
2.13.4	Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap IPM ..	47
2.13.5	Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap IPM ..	48
2.13.6	Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM	49
2.13.7	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap...	49

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	51
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	51
3.3	Data dan Sumber Data	52
3.4	Definisi Operasional	52
3.4.1	Variabel Independen	34
3.4.2	Variabel Dependen	53
3.4.3	Variabel Intervening	53
3.5	Teknik Analisa Data	54

BAB IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Deskripsi	59
4.2	Analisis Statistik	62
4.2.1	Uji Kecocokan Model (<i>Goodness of Fit</i>).....	62
4.2.2	Hasil Uji Hipotesis	65
4.2.2.1	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Daerah Fungsi Pendidikan ..	67
4.2.2.2	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Daerah Fungsi Kesehatan ..	67
4.2.2.3	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Modal	68
4.2.2.4	Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap IPM	68
4.2.2.5	Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap IPM	68

4.2.2.6	Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM	69
4.2.2.7	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap IPM	69
4.3	Pembahasan Hasil Penelitia	70
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Daerah Fungsi Pendidikan	70
4.3.2	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Daerah Fungsi Kesehatan	70
4.3.3	Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap Belanja Modal	71
4.3.4	Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap IPM ...	71
4.3.5	Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap IPM	74
4.3.6	Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM	77
4.3.7	Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap IPM	78

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	79
5.2	Keterbatasan Penelitian	80
5.3	Saran	80
5.4	Implikasi Penelitian	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi se-Indonesia	7
2. Tabel 1.2 : Indeks Pembangunan Manusia Kategori Sedang menurut Provinsi se-Indonesia	9
3. Tabel 1.3 : Total Pendapatan Daerah Th 2013, IPM 2014, Kategori IPM	12
4. Tabel 2.1 : Daftar penelitian terdahulu	42
5. Tabel 3.1 : <i>Goodness of fit Index Indics</i>	56
6. Tabel 4.1 : Statistik Deskriptif	60
7. Tabel 4.2 : <i>Goodness of fit Index</i>	63
8. Tabel 4.3 : Hasil Estimasi Lisrel	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian	44
2. Gambar 4.1 : Hasil Model Penelitian	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1 : Hasil Output Lisrel	
2. Lampiran 2 : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru 201-2014	
3. Lampiran 3 : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru 201-2014 Kategori Sedang	
4. Lampiran 4 : Total Pendapatan 2013, IPM 2014, Kategori IPM	
5. Lampiran 5 : Total Pendapatan Provinsi 2009-2013	
6. Lampiran 6 : Total Pendapatan Provinsi 2009-2013	
7. Lampiran 7 : Total Pendapatan Provinsi 2009-2013	
8. Lampiran 8 : Total Pendapatan Provinsi 2009-2013	

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Grafik 1.1 : Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah per Agregat Provinsi (2009-2013)	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menjadi lebih baik yaitu peningkatan dari keadaan semula. Dengan kata lain pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation building*) (Siagian 1994) dalam Rizanti (2012). Maka makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa

mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (perkapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran.

Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari

dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, selanjutnya undang-undang tersebut diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan otonomi daerah efektif dimulai 1 Januari 2001, mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Konsep desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu formulasi dalam memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebab sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Pada prinsipnya desentralisasi mempunyai tujuan yaitu mewujudkan kemandirian daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan agar menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dan hal tersebut tercermin dengan indikator, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketahanan Sosial dan Kerukunan Sosial.

Pemberlakuan otonomi daerah tersebut juga secara tegas memisahkan fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, atau pada pemerintahan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dengan kata lain kaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan, dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan

pemerintahan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Teori keagenan juga tercermin dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang (Mardiasmo: 2002)

Pentingnya anggaran sektor publik pemerintah daerah mengingat pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu permasalahan dalam penganggaran adalah sumberdaya yang terbatas demikian juga dalam pengalokasiannya mengingat banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi.

Upaya logis yang mungkin bisa dilakukan pemerintah daerah dalam keterbatasannya dan tetap mendapatkan kepercayaan publik adalah dengan

melakukan pergeseran alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa peningkatan dalam belanja daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini peneliti memproksikannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan manifestasi dari tiga dimensi dasar yaitu mencakup dimensi umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Pembangunan manusia adalah suatu hal yang sentral dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat itulah sebabnya pembahasan mengenai pembangunan manusia menjadi suatu hal yang penting.

Sumber-sumber pendapatan daerah pada APBD dalam penggunaannya diharapkan bisa sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah nyata yang bisa ditempuh untuk mewujudkan itu semua adalah dengan meningkatkan pelayanan publik serta peningkatan sarana prasarana masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka selanjutnya setiap peningkatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya juga diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari angka IPM nya.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi se - Indonesia

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81
Sumatera Utara	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87
Sumatera Barat	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36
Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33
Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24
Sumatera Selatan	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75
Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06
Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42
Kep. Bangka Belitung	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27
Kepulauan Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40
Dki Jakarta	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39
Jawa Barat	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80
Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78
Daerah Istimewa Yogyakarta	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14
Banten	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89
Bali	70,10	70,87	71,62	72,09	72,48
Nusa Tenggara Barat	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31
Nusa Tenggara Timur	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26
Kalimantan Barat	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89
Kalimantan Tengah	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77
Kalimantan Selatan	65,20	65,89	66,68	67,17	67,63
Kalimantan Timur	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82
Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00	67,99	68,64
Sulawesi Utara	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96
Sulawesi Tengah	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43
Sulawesi Selatan	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49
Sulawesi Tenggara	65,99	66,52	67,07	67,55	68,07
Gorontalo	62,65	63,48	64,16	64,70	65,17
Sulawesi Barat	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24
Maluku	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74
Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18
Papua Barat	59,60	59,90	60,30	60,91	61,28
Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75
Indonesia	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan relatif antar daerah di Indonesia. BPS-UNDP-Bappenas (2015) mengklasifikasikan IPM suatu daerah ke dalam empat kategori, yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah
2. $60 < IPM < 70$: IPM sedang
3. $70 < IPM < 80$: IPM tinggi
4. $IPM > 80$: IPM sangat tinggi.

Berdasarkan pengklasifikasian tersebut pada tahun 2010 provinsi yang masuk kategori tinggi terdapat 5 provinsi dengan nilai IPM antara 70-80 yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Terdapat 24 Provinsi masuk kategori sedang dengan nilai IPM berkisar dari 60-70. Serta 4 Provinsi masuk kategori rendah dengan nilai IPM di bawah 60 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua dari total 33 Provinsi di Indonesia

Jika dilihat Tabel 1.1 secara umum nilai IPM menurut provinsi di Indonesia masuk kategori sedang yang menandakan pengalokasian belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Indonesia masih kurang optimal. Hal senada disampaikan gubernur Lampung pada acara HUT Lampung ke 52 dalam harian Medinas Lampung Senin 21 Maret 2016 menyinggung tentang capaian IPM provinsi Lampung yang sulit bangkit dan masih terendah di Sumatera terutama karena faktor pendidikan. Demikian juga yang disampaikan oleh Khaidir Bujung wakil ketua komisi V DPRD Lampung pada acara yang sama, yang menjelaskan penyebab IPM Lampung terendah di Sumatera, karena pendidikan di Lampung

tertinggal dan tidak dijadikan prioritas. Hal ini dapat dilihat dari turunnya anggaran pendidikan yang sebelumnya sebesar 289 milyar rupiah menjadi 160 miliar rupiah.

Jika dipilah lebih lanjut pengkategorian IPM tersebut di atas terhadap provinsi dengan angka IPM yang masuk kategori sedang sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2014, maka akan diperoleh tabel sebagai berikut, dan sekaligus dijadikan objek amatan penelitian kedepan

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Kategori Sedang menurut provinsi se-Indonesia

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81
Sumatera Utara	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87
Sumatera Barat	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36
Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24
Sumatera Selatan	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75
Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06
Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42
Kep. Bangka Belitung	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27
Jawa Barat	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80
Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14
Banten	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89
Nusa Tenggara Barat	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31
Kalimantan Barat	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89
Kalimantan Tengah	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77
Kalimantan Selatan	65,20	65,89	66,68	67,17	67,63
Sulawesi Utara	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96
Sulawesi Tengah	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43
Sulawesi Selatan	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49
Sulawesi Tenggara	65,99	66,52	67,07	67,55	68,07
Gorontalo	62,65	63,48	64,16	64,70	65,17
Maluku	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74
Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18
Indonesia	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa seluruh Provinsi di Indonesia yang IPM nya masuk kategori sedang selama masa pengamatan. Sementara ada beberapa Provinsi yang semula masuk kategori rendah namun beberapa tahun kebelakang sudah memperbaiki posisinya dengan meningkatkan IPM nya sehingga masuk kategori sedang yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua terhadap daerah Provinsi tersebut dikeluarkan dari objek pengamatan demikian juga terhadap Provinsi yang semula masuk kategori sedang kemudian masuk kategori tinggi juga dikeluarkan dari objek pengamatan yaitu Provinsi Riau.

Peneliti memilih Provinsi yang memiliki IPM kategori sedang di Indonesia sebagai objek penelitian karena belum ada penelitian sejenis yang meneliti Provinsi dengan IPM kategori sedang. Berdasarkan data tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa Provinsi di Indonesia mayoritas memiliki IPM sedang. Pada penelitian sebelumnya yang diteliti adalah keseluruhan kategori IPM yang diambil sebagai objek penelitian. Penelitian terdahulu terkait IPM sebagai objek penelitian diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. Hasil penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja modal. DAU, DAK, dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM. Desi Suryati (2015) Pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia

hasilnya semua variable belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja pegawai berpengaruh negative dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Shome dan Tondon (2010) melakukan penelitian tentang Keseimbangan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi studi pada 5 negara Asean, menyimpulkan bahwa Hasil analisis korelasi terhadap ke 5 negara Asean menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan per kapita dan IPM dengan koefisien korelasi sebesar 0,4760

Kurang optimalnya pengalokasian belanja daerah pada Provinsi di Indonesia tergambar pada sumber daya yang dimiliki dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dicapainya dalam hal ini yang diproksikan oleh besaran angka IPM tersebut. Jika dilihat lebih jauh lagi terhadap besarnya pendapatan daerah pada APBD masing- masing daerah, tergambar bahwa selayaknya jika pemerintah daerah provinsi dalam membelanjakan anggaran yang dimiliki untuk semaksimal mungkin memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga IPM masing-masing daerah Provinsi bisa meningkat, daripada menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat pemborosan anggaran dan tidak berdampak terhadap pembangunan daerah ataupun bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kajian lebih dalam terhadap pendapatan daerah pada APBD provinsi di Indonesia seperti terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Total Pendapatan Daerah Th 2013, IPM 2014, Kategori IPM

Provinsi	Pendapatan 2013	IPM 2014	Kategori
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	10.111.367	68,81	Sedang
Prov. Sumatera Utara	8.481.872	68,87	Sedang
Prov. Sumatera Barat	3.145.714	69,36	Sedang
Prov. Riau	6.597.232	70,33	Tinggi
Prov. Jambi	2.446.375	68,24	Sedang
Prov. Sumatera Selatan	5.768.315	66,75	Sedang
Prov. Bengkulu	1.683.862	68,06	Sedang
Prov. Lampung	4.410.730	66,42	Sedang
Prov. DKI Jakarta	41.525.337	78,39	Tinggi
Prov. Jawa Barat	16.651.602	68,80	Sedang
Prov. Jawa Tengah	11.930.237	68,78	Sedang
Prov. DI Yogyakarta	2.286.855	76,81	Tinggi
Prov. Jawa Timur	14.996.874	68,14	Sedang
Prov. Kalimantan Barat	3.247.135	64,89	Sedang
Prov. Kalimantan Tengah	2.501.735	67,77	Sedang
Prov. Kalimantan Selatan	4.369.706	67,63	Sedang
Prov. Kalimantan Timur	11.500.000	73,82	Tinggi
Prov. Sulawesi Utara	1.915.749	69,96	Sedang
Prov. Sulawesi Tengah	2.139.536	66,43	Sedang
Prov. Sulawesi Selatan	5.022.566	68,49	Sedang
Prov. Sulawesi Tenggara	1.898.244	68,07	Sedang
Prov. Bali	3.568.393	72,48	Tinggi
Prov. Nusa Tenggara Barat	2.492.622	64,31	Sedang
Prov. Nusa Tenggara Timur	2.335.363	62,26	Sedang
Prov. Maluku	1.557.387	66,74	Sedang
Prov. Papua	8.184.736	56,75	Rendah
Prov. Maluku Utara	1.326.442	65,18	Sedang
Prov. Banten	5.718.701	69,89	Sedang
Prov. Bangka Belitung	1.541.665	68,27	Sedang
Prov. Gorontalo	1.038.201	65,17	Sedang
Prov. Kepulauan Riau	2.273.421	73,40	Tinggi
Prov. Papua Barat	4.253.303	61,28	Sedang
Prov. Sulawesi Barat	1.090.246	62,24	Sedang

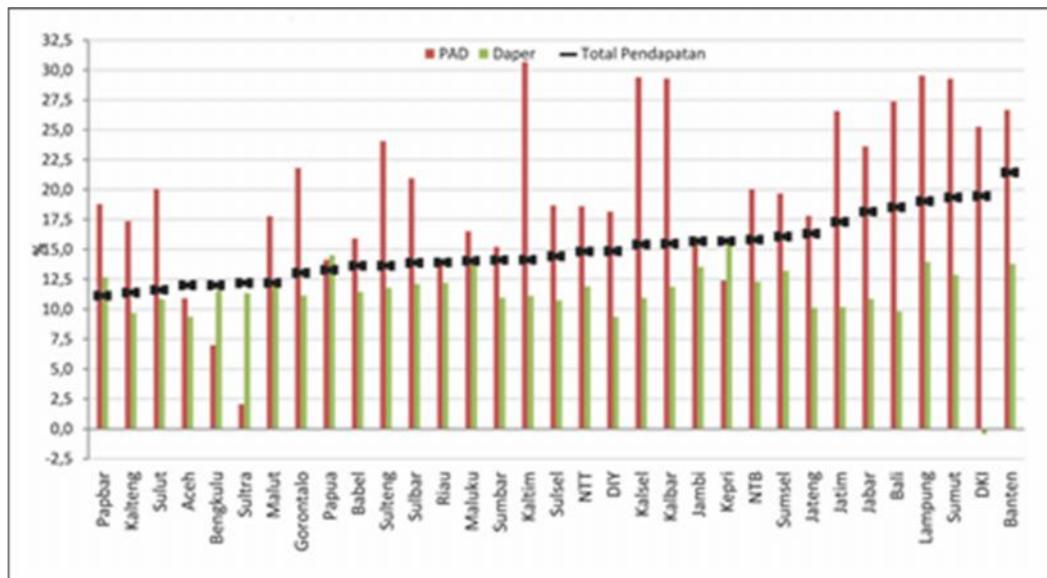
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, BPS data di olah

Pada Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah pada APBD Provinsi di Indonesia pada tahun 2013 yang merupakan input untuk menghasilkan IPM tahun 2014, selayaknya ada beberapa daerah bisa masuk kategori IPM tinggi karena memiliki sumberdaya berupa pendapatan daerah untuk dibelanjakan bagi kepentingan daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumberdaya yang relatif lebih rendah pendapatan daerah pada APBD nya tetapi memiliki IPM

yang masuk kategori tinggi seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Berdasarkan fenomena tersebut bisa disimpulkan bahwa ada permasalahan yakni kurang maksimalnya pengalokasian belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa Provinsi di Indonesia. Hakikatnya APBD tersebut disusun harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan salah satu manifestasinya adalah besarnya angka IPM, tetapi kenyataannya rata-rata IPM Provinsi di Indonesia masuk kategori sedang dengan kisaran antara 60-70. Angka IPM ini sendiri merupakan wujud dari keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan belanja daerahnya yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan dan belanja modal.

Karakteristik pendapatan daerah pada APBD tiap-tiap Provinsi di Indonesia secara umum tidak jauh berbeda yaitu didominasi oleh dana perimbangan, terlihat pada grafik rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah per agregat Provinsi dari tahun 2009-2013 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut.

Grafik 1.1
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah per Agregat Provinsi (2009 – 2013)



Sumber: DJPK kementerian Keuangan

Berdasarkan data trend 2009 hingga 2013 maka kita juga bisa melihat gambaran tingkat pertumbuhan total Pendapatan Daerah beserta komponen utamanya yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Secara agregat pendapatan seluruh daerah per provinsi dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan total Pendapatan Daerah yang tertinggi adalah di Provinsi Banten (21,4%), lalu diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (19,5%) dan Provinsi Sumatera Utara (19,4%). Sedangkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang terendah adalah di Provinsi Papua Barat (11,1%), Provinsi Kalimantan Tengah (11,4%), dan Provinsi Sulawesi Utara (11,6%).

Bila dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhan PAD per tahunnya yang tertinggi adalah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 30,7%, lalu diikuti oleh Provinsi Lampung yaitu sebesar 29,5%, dan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 29,4%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD yang

terendah yaitu di bawah 11% terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di kisaran 2,0%, Provinsi Bengkulu sebesar 7,0%, Provinsi Aceh sebesar 10,9%.

Di sisi lain rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2009 hingga 2013 cenderung tidak terlalu tajam fluktuasinya antar provinsi yaitu di kisaran 9,0% hingga 16,0%, dengan pengecualian Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan -0,4%.

Besarnya pendapatan suatu daerah selain dipengaruhi oleh PAD dan dana perimbangan, pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya hibah, bantuan keuangan dari daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta lain-lain. Bagi daerah-daerah tertentu besarnya dana penyesuaian dan otonomi khusus cukup besar mempengaruhi pendapatan daerah pada APBD nya seperti Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Papua.

Perubahan proporsi alokasi belanja untuk hal-hal yang positif dan lebih berpihak kepada masyarakat misalnya melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik akan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada peningkatan IPM suatu daerah. Alokasi belanja yang berisikan program dan kegiatan yang merupakan aplikasi dari aktivitas pembangunan seharusnya bertumpu pada hal tersebut dan semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan dasar. Oleh karena itu alokasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja modal memegang peranan penting guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian pada sektor publik yang menganalisa pendapatan daerah, belanja daerah dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari besaran angka IPM diantaranya yaitu: penelitian dari Shome dan Tondon (2010) meneliti tentang hubungan antara pendapatan per kapita terhadap IPM 5 negara Asean hasil penelitiannya menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan per kapita dan IPM. Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Desi Suryati (2015) tentang pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi nusa tenggara barat tahun 2007-2012 dan menyimpulkan semua variable belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja pegawai berpengaruh negative dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan.

Perbedaan penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu tersebut adalah jika penelitian terdahulu hanya mengkaji hubungan pendapatan terhadap IPM dan pengaruh belanja klasifikasi ekonomi terhadap IPM, pada penelitian ini meneliti pengaruh dari pendapatan daerah terhadap IPM yang di mediasi oleh belanja berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan dan belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan daerah pada APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja fungsi pendidikan sebagai pemediasi?
2. Apakah Pendapatan daerah pada APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja fungsi kesehatan sebagai pemediasi?
3. Apakah Pendapatan daerah pada APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja modal sebagai pemediasi?
4. Apakah Pendapatan daerah pada APBD memiliki pengaruh terhadap IPM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui belanja daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan belanja modal baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan secara akademik dan praktis yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis/Keilmuan

Dalam konteks keilmuan, penelitian ini akan mempertegas implementasi teori Ekonomi Publik khususnya aspek pembiayaan publik (pemerintah daerah), keterkaitan antara konsep teori dan kondisi riil akan lebih tergambar dengan jelas khususnya tentang pembangunan manusia

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan pembangunan daerah dalam rangka penyempurnaan pemerintahan daerah, terutama yang membidangi program perencanaan pembangunan daerah, dan sebagai bahan dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan, serta sebagai bahan perencanaan strategi kedepan bagi pengambilan keputusan khususnya dalam kaitan pembangunan manusia.

Dengan adanya perhitungan dan analisis penelitian ini, semua pihak yang menjadi *stakeholders* akan lebih mudah mengukur kinerja Pemerintah Daerah, yang tercermin dari kebijakannya akan keberpihakan kepada publik dalam mengalokasikan anggaran belanjanya pada APBD, serta jika dilihat lebih jauh dapat juga diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Penganggaran di Pemerintah Daerah

Anggaran daerah merupakan suatu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Karena anggaran daerah cerminan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai segala kebutuhan daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan daerah dan peningkatan terhadap pelayanan publik, dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Anggaran yang baik mencerminkan efektifitas kinerja pemerintah oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mampu membuat anggaran yang baik dan realistis untuk diaplikasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Pada proses penyusunan APBD hendaknya memberikan gambaran mengenai latar belakang pengambilan keputusan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi, serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, disini juga bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab, baik antara eksekutif dan legislatif maupun dikalangan internal eksekutif sendiri.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat (Mardiasmo, 2002).

Menurut Samuel (2000) dalam Oktriniatmaja (2011) penganggaran setidaknya memiliki tiga tahapan, yakni perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Sedangkan menurut Von Hagen (2002) dalam Oktriniatmaja (2011) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.

2.2 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Berdasarkan tujuan administratif keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui desentralisasi. Tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara yang besar yang dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan dalam semua aspek kebijakan publik. Demikian pula tidak ada pemerintah pusat yang dapat secara efektif mengimplementasikan kebijakan dan program-programnya ke seluruh daerah secara efisien Bowman & Hampton (1983) dalam Thesia (2013).

Karena itu diperlukan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu baik atas dasar prinsip desentralisasi maupun atas dasar prinsip dekonsentrasi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari kecenderungan yang terjadi di berbagai negara di dunia, meskipun tetap memiliki warna tersendiri yang berbeda. Perjalanan otonomi daerah di Indonesia setelah kemerdekaan dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1945 yang kemudian dalam perjalanan sejarah disempurnakan dengan UU No. 22 tahun 1948, UU No.1 tahun 1957, Penpres No. 6 tahun 1959, UU No. 18 tahun 1965, UU No.5 tahun 1974 dan terakhir dengan UU No.22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No 32 tahun 2004. Melalui desentralisasi pemerintahan, rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan keinginannya, karena mereka memang dianggap lebih mengetahui apa yang mereka inginkan dan keadaan daerahnya sendiri.

Dengan demikian merekalah yang dianggap paling pantas untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan daerahnya. Pada negara berkembang, pemerintah daerah dianggap mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam proses pembangunan Cochrane (1983) dalam Thesia (2013) . Karena adanya berbagai alasan teknis yang dapat dilihat dari berbagai segi seperti segi ekonomi, geografis, etnis, budaya, dan sejarah.

Panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh, mulai dari perencanaan pembangunan maupun pelaksanaannya, membuat sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dinilai jauh lebih efisien. Hal ini karena dengan desentralisasi

dapat dilakukan pemotongan sejumlah jalur birokrasi yang panjang dan tidak perlu. Dengan demikian desentralisasi dapat mengurangi adanya *overload* (kelebihan beban) dan *congestion* (pemusatan) administrasi dan *communication* (komunikasi) di tingkat pusat Rondinelli (1983) dalam Thesia (2013).

Demikian pula, hamparan wilayah yang luas dari suatu negara dengan keadaan geografis yang bias sangat berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya menuntut penanganan yang khusus bagi setiap daerah. Bahkan bagi negara-negara yang sangat kecil sekalipun, pemerintahan daerah dengan tingkat otonomi tertentu tetap dibutuhkan. Etnis, budaya dan sejarah bahkan bahasa yang berbeda, yang menghasilkan sistem sosial yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya merupakan alasan lain mengapa sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dibutuhkan dalam suatu negara.

Sedangkan menurut Sidik (1994) dalam Thesia (2013) pelaksanaan desentralisasi sistem pemerintahan memiliki beberapa keuntungan, antara lain menyebarkan pusat pengambilan keputusan (*decongestion*); kecepatan dalam pengambilan keputusan (*speed*); pengambilan keputusan yang realistis (*economic and social realism*); penghematan (*economic efficiency*); keikutsertaan masyarakat lokal (*local participation*); serta solidaritas nasional (*national solidarity*).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya apabila kegiatan APBD dilakukan dengan baik. Dikarenakan pada saat ini pemerintah

menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan perda APBD.
6. Penetapan APBD.

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari

waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun.

Yang dilibatkan dalam penyusunan APBD adalah rakyat, eksekutif, dan legislatif. Pada proses penyusunan APBD rakyat dilibatkan pada tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pada tingkat rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan Pengesahan RAPBD rakyat sama sekali tidak dilibatkan. Dalam menyusun APBD ada prinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah:

1. Transparansi dan Akuntabilitas
2. Disiplin Anggaran
3. Keadilan Anggaran
4. Efisiensi dan Efektifitas
5. Format Anggaran
6. Rasional dan Terukur
7. Pendekatan Kinerja Dokumen Publik

2.3 Teori kagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi

teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi ataukah perilaku oportunistik bagi si Agen.

Di organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (*voter*) atau rakyat. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

2.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam

pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.
2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 110/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.
4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran.

Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara

eksekutif dan legislatif tentang kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan KUA dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.5 Pendapatan Daerah

Menurut UU nomor 23 tahun 2014, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut : “Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.” Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari ketiga definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah.

Sumber Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer)
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian/konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 3 huruf (a), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Pendapatan tranfer ini terdiri dari:

- a) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu untuk

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini terdiri dari DBH Pajak (PBB, BPHTB, dan PPh Perorangan) dan DBH Sumber Daya Alam (kehutanan, Pertambangan umum, perikanan, Pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi).

- b) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a) Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
- c) Dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota.
- d) Dana penyesuain dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e) Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari kelompok pendapatan di atas, hanya Pendapatan Asli Daerah yang ada di SKPD, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya hanya ada di PPKD.

Beberapa ketentuan pendapatan daerah adalah:

- a) semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah
- b) semua pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- c) SKPD dilarang memungut pendapatan selain sesuai dengan kewenangannya yang diatur berdasarkan Perda.
- d) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang merupakan pendapatan daerah.
- e) Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- f) SKPD dilarang menggunakan langsung pendapatan untuk membiayai pengeluaran/belanja, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

2.6 Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah tersebut merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan

umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan

organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i. pendidikan; serta
- j. perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja modal;
- d. bunga;
- e. subsidi;
- f. hibah;
- g. bantuan sosial;
- h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
- i. belanja tidak terduga.

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.7 Belanja Daerah fungsi pendidikan

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Masih menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja daerah fungsi pendidikan adalah besarnya dana atau sumber daya keuangan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum bidang pendidikan, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara .

2.8 Belanja fungsi kesehatan

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Masih menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja daerah fungsi kesehatan merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanannya seperti pembelian obat, fasilitas kesehatan alat medis maupun penunjang dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara .

2.9 Belanja modal

Menurut Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Belanja modal adalah belanja daerah yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka Pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

2.10 Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) mengartikan kesejahteraan secara lebih luas lebih dari hanya sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita, yaitu dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia.

Pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Jika dilihat lebih dalam lagi makna pembangunan manusia sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan sosial.

Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah IPM atau disebut juga dengan *Human Development Index (HDI)*.

Rasio IPM ini memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia :

1. Panjang umur dan menjalani hidup sehat (angka harapan hidup saat lahir).
2. Terdidik (gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah).
3. Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan).

Rumus perhitungan IPM adalah sebagai berikut:

Pertama-tama menghitung indeks setiap komponen.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Dimensi kesehatan} : I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan} : I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$: I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran} : I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran_{min})}{\ln(Pengeluaran_{maks}) - \ln(Pengeluaran_{min})}$$

Selanjutnya menghitung IPM sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran} \times 100}$$

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy - e*) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau *Mortpack*. AHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan AHH negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak

Langkah-langkah menghitung harapan lama sekolah adalah sebagai:

- Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas).
- Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas)
- Menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur
- Menghitung harapan lama sekolah

Rata- rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal

Langkah-langkah menghitung rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

- seleksi penduduk pada umur 25 tahun ke atas
- mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki
- mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
- mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir
- menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir.
- menghitung lamanya bersekolah

Menghitung indeks pengeluaran langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari Susenas
- Menghitung nilai riil dari rata-rata pengeluaran per kapita
- Menghitung paritas daya beli
- Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan

IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004).

Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa "pembayaran transfer", dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya.

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah pada sektor publik pada berbagai daerah di Indonesia terutama yang menyangkut pendapatan daerah menghasilkan kesimpulan dan hasil tidak konsisten. Berdasarkan penelitian Wertianti dan Dwirandra (2013) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi pada belanja modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, adapun hasil dari penelitiannya adalah menunjukkan bahwa secara simulatan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Sedangkan Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara positif terhadap belanja modal akan tetapi pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

Harianto dan Adi (2007) mengambil judul penelitian Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita, dan berhasil menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sayangnya kontribusi dari DAU terhadap Belanja Modal masih kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang merata, Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Per Kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah, Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung)

Purnama (2014) meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan kota di Jawa Tengah periode 2012-2013, hasilnya sebagai berikut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan luas wilayah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. Hasil penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja modal. DAU, DAK, dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM.

Desi Suryati (2015) Pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007-2012 hasilnya semua variabel belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja pegawai berpengaruh negatif dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi

tidak signifikan.

Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) meneliti tentang Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun.

Kesimpulan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah

Shome dan Tondon (2010) melakukan penelitian tentang Keseimbangan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi studi pada 5 negara Asean, menyimpulkan bahwa Hasil analisis korelasi terhadap ke 5 negara Asean menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan per kapita dan IPM dengan koefisien korelasi sebesar 0,4760

Tabel 2.1
Daftar penelitian terdahulu

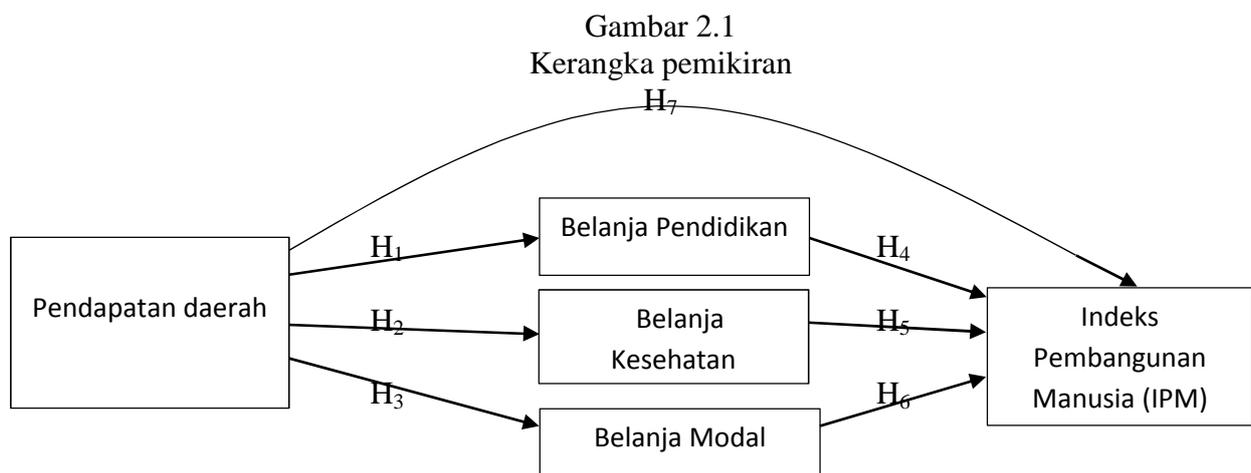
No	Nama Peneliti/ Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Wertianti dan Dwirandra (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD, dan DAU sebagai variabel moderasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi diprosikan dengan PDRB • Belanja Modal • PAD • DAU 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal • PAD mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal • DAU tidak mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal
2	Darwanto dan Yustikasari (2007) Pengaruh Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan dengan PDRB • PAD • DAU • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal • Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal • PAD dan DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal
3	Hariato dan Adi (2007) Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • Belanja Modal • PAD • Pendapatan Per Kapita 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal • Belanja Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap Pendapatan Per

	Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita		Kapita dalam hubungan secara langsung tetapi juga mempunyai hubungan yang positif secara tidak langsung melalui PAD <ul style="list-style-type: none"> • PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan Per Kapita • DAU berdampak signifikan terhadap PAD melalui Belanja Modal
4	Purnama (2014) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2012-2013	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • PAD • SiLPA • Luas Wilayah • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian DAU dan SiLPA tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal • PAD dan Luas Wilayah Berpengaruh secara parsial secara parsial dan signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
5	Setyowati dan Suparwati (2012) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai variabel intervening	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • DAU • DAK • PAD • Belanja Modal • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM • DAU, DAK, PAD berpengaruh positif terhadap IPM • Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM
6.	Desi Suryati (2015) Pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi nusa tenggara barat tahun 2007-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Belanjapegawai • belanja barang dan jasa • belanja modal • angka kemiskinan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • semua variable belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja pegawai berpengaruh negative dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan.
7.	Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun	<ul style="list-style-type: none"> • PAD (pajak) • DAK • Belanja Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah
8.	Shome dan Tondon (2010) Keseimbangan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi studi pada 5 negara Asean	<ul style="list-style-type: none"> • pendapatan per kapita • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis korelasi terhadap ke 5 negara Asean menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan per kapita dan IPM dengan koefisien korelasi sebesar 0,4760

Sumber : Penelitian-penelitian terdahulu

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran membantu menjelaskan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:



2.13 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

2.13.1 Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD terhadap belanja daerah fungsi pendidikan

Pendapatan daerah pada APBD pada prinsipnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang dialokasikan melalui belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Makin besar pendapatan daerah maka semakin besar juga kemampuan daerah untuk mengalokasikan belanja sesuai kebutuhannya dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya seiring dengan besarnya sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan pernyataan

diatas maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan suatu daerah tentu akan mempengaruhi akan besarnya belanja daerah tersebut tidak terkecuali dengan belanja pendidikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) menyatakan bahwa pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah atas dasar tersebut maka timbulah hipotesis sebagai berikut

H₁ : Pendapatan pada APBD berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan.

2.13.2 Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD Terhadap Belanja Daerah Fungsi Kesehatan

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa Pendapatan daerah pada APBD pada prinsipnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang dialokasikan melalui belanja daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan memperpendek rantai jalur birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk berupa pelayanan dasar berupa kesehatan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah.

Maka peneliti menduga bahwa ada pengaruh besarnya pendapatan suatu daerah terhadap besarnya belanja daerah fungsi kesehatan. Sehingga hipotesis yang dihasilkan adalah:

H₂ : Pendapatan daerah pada APBD berpengaruh positif terhadap belanja daerah fungsi kesehatan.

2.13.3 Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD Terhadap Belanja Modal

Semakin besar pendapatan suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modal yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Dengan meningkatnya pendapatan pemerintah daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki sehingga akan berimplikasi pada pembangunan daerah terutama infrastruktur dan sarana prasarana bagi kepentingan publik yang semuanya itu diwujudkan dalam bentuk belanja modal. Belanja modal yang ditujukan untuk memperoleh aset baik bagi pemerintah maupun yang diperuntukan bagi masyarakat yang seluruhnya akan bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga makin besar pendapatan daerah maka makin besar juga kemampuan dalam mengalokasikan belanja modal.

Kesimpulan yang sama dihasilkan oleh penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa hasil penelitiannya secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Atas dasar tersebut maka peneliti menduga bahwa ada pengaruh besarnya pendapatan suatu daerah terhadap besarnya belanja modal. Hipotesis atas pernyataan tersebut adalah:

H₃ : Pendapatan daerah pada APBD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.13.4 Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu ukuran gabungan tiga dimensi pembangunan manusia yaitu panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir yakni rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, terdidik yang diukur dengan rata-rata lama sekolah yakni jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan angka harapan lama sekolah yakni lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas yang juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dan dimensi terakhir adalah standar hidup yang layak.

Atas dasar itu maka diasumsikan bahwa belanja pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap besarnya angka IPM suatu daerah karena pendidikan merupakan salah satu dari tiga dimensi yang membangun IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Suryati (2015) tentang pengaruh belanja

daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi nusa tenggara barat tahun 2007-2012 menghasilkan kesimpulan bahwa semua variable belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja pegawai berpengaruh negative dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Atas dasar tersebut maka dikembangkanlah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Belanja fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM.

2.13.5 Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan Terhadap IPM

Pengembangan hipotesis sebelumnya menyatakan bahwa IPM dibangun atas dasar tiga dimensi termasuk didalamnya dimensi kesehatan atas dasar hal tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa belanja belanja kesehatan akan ikut mempengaruhi besaran angka IPM suatu daerah.

Dukungan pernyataan diberikan oleh penelitian Desi Suryati (2015) tentang pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi nusa tenggara barat tahun 2007-2012 menghasilkan kesimpulan bahwa semua variable belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja pegawai berpengaruh negative dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Dengan demikian dibangun hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM.

2.13.6 Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun, cakupan belanja modal tidak hanya sebatas aset fisik yang dikuasai pemerintah melainkan lebih luas termasuk di dalamnya aset yang akan diserahkan kepada masyarakat yang bertujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa makin besar belanja modal suatu daerah akan meningkatkan angka IPM nya. Keadaan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU,DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai variabel intervening yang menghasilkan kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM. DAU, DAK, PAD berpengaruh positif terhadap IPM, Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM. Dengan demikian hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₆ : Belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM.

2.13.7 Pengaruh Pendapatan Daerah pada APBD Terhadap IPM

Pendapatan daerah merupakan sumberdaya bagi suatu daerah untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya pendapatan suatu daerah akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam

melaksanakan rutinitas pemerintahannya termasuk dalam upayanya mensejahterakan masyarakat, apabila masyarakat sejahtera IPM daerah tersebut juga akan relatif lebih tinggi. Sehingga makin besar pendapatan suatu daerah makin tinggi juga IPM nya.

Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa ada pengaruh besarnya pendapatan suatu daerah terhadap besarnya angka IPM daerah tersebut.

Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian Shome dan Tondon (2010) melakukan penelitian hubungan antara pendapatan per kapita dan IPM terhadap 5 negara Asean. Hasil analisis korelasi terhadap ke 5 negara Asean menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan per kapita dan IPM dengan koefisien korelasi sebesar 0,4760. Maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₇ : Pendapatan daerah pada APBD berpengaruh positif terhadap IPM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif mengenai pengaruh pendapatan daerah pada APBD terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ini di proksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia melalui belanja daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja modal sebagai pemediasi. Analisa data kuantitatif adalah analisis yang digunakan pada data sekunder dengan menggunakan metode statistik. Data yang diperoleh selama penelitian dikelola lebih lanjut berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan untuk kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu APBD seluruh provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Data sampel diambil menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Provinsi yang data IPM nya dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Provinsi yang datanya terpublikasikan oleh Kementerian Keuangan pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah selama periode 2009-2013.

3. Provinsi yang klasifikasi IPM nya secara konsisten masuk kategori sedang pada masa tahun amatan yaitu tahun 2010-2014.

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2006) data sekunder adalah data yang dibuat atau dikumpulkan oleh pihak luar.

Data penelitian ini bersumber dari dokumen APBD yang diperoleh dari situs

Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui

www.djpk.kemenkeu.go.id periode tahun 2009-2013. Data yang digunakan

adalah APBD pada komponen pendapatan, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja modal. Serta data IPM yang diperoleh dari situs

Badan Pusat Statistik melalui www.bps.go.id. Data tersebut merupakan *pooled*

Data atau kombinasi dari data *time series* dan *cross section*.

3.4 Definisi Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel *independent*

terhadap variabel *dependent*. Variabel *independent* adalah pendapatan daerah

pada APBD melalui Belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi

kesehatan dan belanja daerah untuk belanja modal sebagai variabel intervening

sedangkan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, berikut

definisi operasional untuk masing-masing variabel:

3.4.1 Variabel *Independent*

Menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pendapatan daerah adalah semua hak

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan.

3.4.2 Variabel *Dependent*

Variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu angka indeks yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka indeks tersebut cerminan terhadap kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan manifestasi dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat atas kebijakan dan wewenang yang dimiliki dalam membelanjakan anggaran. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dialokasikan melalui belanja dan baru akan dirasakan dampaknya satu tahun kedepan, oleh karena itu IPM pada penelitian ini diukur satu tahun kedepan ($t + 1$).

3.4.3 Variabel *Intervening* (Pemediasi)

Variabel *intervening* adalah variabel yang memediasi hubungan antara variabel *independent* dan variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal. Berikut definisi dari variabel-variabel tersebut:

1. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja fungsi pendidikan adalah klasifikasi belanja yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara pada bidang pendidikan.
2. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja fungsi kesehatan adalah klasifikasi belanja yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan

pengelolaan keuangan negara pada bidang kesehatan.

3. Menurut Permendagri 2006 belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3.5 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan, belanja daerah untuk belanja modal baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik SEM (*Structural Equation Model*). *Structural equation modeling* merupakan suatu teknik statistik yang dipakai untuk menguji serangkaian hubungan antara beberapa variabel yang terbentuk dari variabel faktor atau variabel terobservasi. Metode analisis verifikatif statistik pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan software LISREL (*Linear Structural RELationships*) merupakan satu-satunya program SEM yang terancang yang dapat mengestimasi berbagai masalah didalam SEM selain itu LISREL merupakan program yang paling informatif dalam menyajikan hasil- hasil statistik, sehingga modifikasi model dan penyebab tidak fit atau buruknya suatu model dapat dengan mudah diketahui. Tahap-tahap didalam SEM sebagai berikut :

1. Konseptualisasi model adalah tahap ini berhubungan dengan pengembangan hipotesis sebagai dasar dalam menghubungkan variabel laten dengan variabel laten lainnya, serta dengan indikator- indikatornya
2. Menyusun diagram alur (*path diagram construction*) yang tujuannya untuk memudahkan kita dalam memvisualisasi hipotesis yang telah diajukan
3. Spesifikasi model dan menggambarkan sifat dan jumlah parameter yang diestimasi ; analisis data tidak dapat dilakukan sampai tahap ini selesai
4. Identifikasi model. informasi yang diperoleh dari data diuji untuk menentukan apakah cukup untuk mengestimasi parameter dalam model
5. Estimasi parameter
6. Penilaian model fit, dikatakan model fit jika kovarians matriks suatu model adalah sama dengan kovarians matrik data
7. Modifikasi model, dilakukan jika model tidak fit namun modifikasi harus berdasarkan teori yang mendukung
8. Validasi silang model yaitu untuk menguji fit-tidaknya model terhadap suatu data baru atau validasi sub sample yang diperoleh melalui prosedur

Persamaan regresi dalam model ini terdiri dari empat model persamaan, yaitu:

1. Model regresi persamaan 1:

$$PDDK_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 PDPT_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

2. Model regresi persamaan 2:

$$KSHT_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_2 PDPT_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

3. Model regresi persamaan 3:

$$BM_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_3 PDPT_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

4. Model regresi persamaan 4:

$$IPM_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 PDDK_{i,t} + \alpha_2 KSHT_{i,t} + \alpha_3 BM_{i,t} + \alpha_4 PDPT_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Dimana :

$IPM_{i,t+1}$: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi i, periode t + 1

$PDPT_{i,t}$: Pendapatan pada APBD Provinsi i, periode t

$PDDK_{i,t}$: Belanja Fungsi Pendidikan Provinsi i, periode t

$KSHT_{i,t}$: Belanja Fungsi Kesehatan Provinsi i, periode t

$BMI_{i,t}$: Belanja Modal Provinsi i, periode t

: Konstanta

: Koefisien Regresi

: *error item*

Selanjutnya data diolah dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan model penelitian pada kerangka pemikiran. Untuk mengestimasi model tersebut, teknik estimasi yang akan digunakan adalah *Maximum Likelihood*. Selanjutnya dilakukan berbagai uji *fit index* untuk mengukur derajat kesesuaian antara model dengan data yang diperoleh. Ketentuan *Goodness of Fit* tersebut dapat di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Goodness of Fit Index Indices

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut-off Value</i>
<i>Chi Square (X²)</i>	Diharapkan kecil
<i>Significance Probability</i>	0,05
RMSEA	0,08
GFI	0,90
AGFI	0,90
CMIN/DF	2,0

TLI	0,90
CFI	0,95
NNFI	0,90
ECVI Model	< ECVI <i>saturation model</i>
AIC Model	< AIC <i>saturation model</i>

Dalam pengujian hipotesis digunakan uji t, yaitu dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Pengujian ini menggunakan *level of significant* () 0,05. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen secara langsung.

Adapun Kriteria :

Jika t hitung $\geq 1,96$, maka Hipotesa didukung

Jika t hitung $< 1,96$ maka Hipotesa tidak didukung

Syarat terpenuhinya suatu mediasi adalah sebagai berikut Pertama, variabel independen harus signifikan mempengaruhi variabel mediator pada persamaan pertama, jadi koefisien a $\neq 0$; kedua, variabel independen harus signifikan mempengaruhi variabel dependen pada persamaan kedua, jadi koefisien c $\neq 0$; dan ketiga, variabel mediator harus signifikan mempengaruhi variabel dependen pada persamaan ketiga, jadi koefisien b $\neq 0$. Mediasi terjadi jika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lebih rendah pada persamaan ketiga (c') dibandingkan pada persamaan kedua (c) (Baron and Kenny., 1986).

Cara lain menguji mediasi adalah *product of coefficient*, yang menguji signifikansi pengaruh tak langsung atau *indirect effect* (perkalian efek langsung atau *direct effect* variabel *independen* terhadap mediator, a dan *direct effect*

mediator terhadap variabel *dependen*, b atau ab). Uji signifikansi *indirect effect* ab dilakukan berdasarkan rasio antara koefisien ab dengan *standard error*-nya yang akan menghasilkan nilai z statistik (*z-value*). Jika *z-value* dalam harga mutlak > 1,96 atau tingkat signifikansi statistik z (*p-value*) < 0,05, berarti *indirect effect* atau pengaruh tak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui mediator, signifikan pada taraf signifikansi 0,05 (Preacher and Hayes., 2004)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dinyatakan bahwa alokasi belanja daerah Provinsi di Indonesia kurang optimal yang tercermin pada besarnya sumber daya yang dimiliki tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan yang dicapai yang diproksikan oleh besaran angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi tersebut. Terkait pernyataan tersebut maka disusunlah penelitian ini dengan tujuan adalah untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan daerah pada APBD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan belanja modal.

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik maupun pembahasan komprehensif berdasar fakta empiris, kajian teori maupun regulasi terkait, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Belanja fungsi pendidikan tidak memediasi pada hubungan antara pendapatan APBD terhadap IPM. Artinya besarnya belanja fungsi pendidikan tidak dapat meningkatkan IPM secara signifikan walaupun pendapatan APBD suatu daerah ditingkatkan.
2. Belanja fungsi kesehatan tidak memediasi pada hubungan antara pendapatan

APBD terhadap IPM. Artinya besarnya belanja fungsi kesehatan tidak dapat meningkatkan IPM secara signifikan walaupun pendapatan APBD suatu daerah ditingkatkan.

3. Belanja modal terbukti memediasi secara signifikan dan positif pada hubungan antara pendapatan APBD terhadap IPM. Artinya semakin besar Pendapatan APBD suatu daerah maka alokasi dalam belanja modal semakin tinggi sehingga IPM suatu daerah akan semakin meningkat.
4. Pendapatan pada APBD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Artinya semakin besar Pendapatan APBD suatu daerah maka IPM suatu daerah akan semakin meningkat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya obyek penelitian yang hanya terbatas pada propinsi yang berjumlah 23 provinsi dengan kategori sedang sehingga hasil kesimpulan kurang dapat digeneralisasikan untuk propinsi lainnya mengingat jumlah propinsi di Indonesia sebanyak 34 propinsi.

5.3. Saran

1. Bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan standar kualitas hidup manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia dilakukan dengan meningkatkan belanja modalnya. Pemerintah daerah disarankan dapat mempertahankan kemampuan merealisasikan pengalokasian anggaran untuk pengeluaran/belanja modal di tahun-tahun selanjutnya terutama seperti sarana prasarana maupun infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan

pelayanan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2. Melihat bahwa IPM di Propinsi se Indonesia yang masih tergolong sedang, maka diharapkan Pemerintah Daerah untuk memberikan prioritas pada upaya peningkatan kualitas manusia serta perbaikan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah baik PAD maupun usulan dari dana transfer pemerintah pusat, sehingga taraf kehidupan masyarakat semakin baik dan hal ini akan dapat meningkatkan IPM.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan hasil penelitian ini dengan memperbanyak sampel penelitian dengan periode yang paling update, sehingga penerapan perhitungan IPM model baru sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Astri, Meylina. Nikensari, Sri Indah dan Kuncara, Harya 2013. *Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah paa sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal pendidikan ekonomi dan bisnis Vol.1 no.1 maret 2013 ISSN.2302-2663
- Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, UNDP. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia* Diakses dari: <http://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal* Simposium Nasional Akuntansi X Makasar.
- Ghozali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS* penerbit: Universitas Diponegoro Semarang.
- Harianto, David dan Priyo Hadi Adi 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1999. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah* Jakarta: Grasindo
- Oktriniatmaja, Rini. 2011. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau jawa dan nusa tenggara*. Tesis Magister Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Purnama, Arif. 2014. *Pengaruh dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembayaran anggaran (SiLPA), dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di jawa tengah periode 2012-2013*.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- _____. 1999. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah.
- _____. 1999. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. 2000. Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- _____. 2000. Peraturan Pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- _____. 2003. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. 2004. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- _____. 2004. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.
- _____. 2004. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2009. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.
- _____. 2014. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016.
- Rizanti, Erika Diana. 2012. *Konsep Pembangunan* Diakses dari: <https://erikadianarizant.wordpress.com/2012/09/02/konsep-pembangunan/>
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus. 2012. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening* Prestasi Vol.9 No.1-Juni 2012.

Shome, Swaha dan Tondon, Sarika 2010. *Balancing human development with economic growth: a study of Asean 5*. Annuals of the University of Peterosani, Economics, 10(1), 2010, 335-348

Thesia, Kennedy. 2013. *Konsep desentralisasi dan otonomi daerah* Diakses dari: <https://kennedythesia.wordpress.com/2013/07>.

Wertianti, I G A Gede dan Dwirandra, A.A.N.B. 2013. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi pada belanja modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi*. E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana 4.3 (2013).

Yani, ahmad. 2008. *Hubungan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers. 2008.

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.bps.go.id